



**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI MATUA HILIA
KABUPATEN AGAM**

Bayu Firdaus¹, Karjuni Dt. Maani²

Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Padang, Indonesia
Email: Bayufirdaus095@gmail.com.

Abstract

This study aims to determine the management of village fund allocation for community empowerment in Nagari Matua Hilia, Agam Regency. The method used in this study is a qualitative approach with a descriptive method. In the selection of informants, researchers use purposive techniques, namely determining informants with certain considerations who are considered to be able to provide maximum data. The resources used in the research are primary data obtained through interviews and direct observations from research informants and secondary data obtained from documents, reports, scientific papers and photographs related to problems in this study. Data is obtained by data collection techniques, namely interviews, observations, and documentation. To ensure the validity of the data, researchers use the technique of triangulation of methods and sources. Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and inference. The results showed that the Nagari Matua Hilia Government has involved the community in managing the allocation of village funds (ADD), but planning for the use of ADD is more focused on the activities of the Nagari government, and has not been adequate in efforts to empower the community with the use of ADD funds. While the inhibiting factors of mobilization carried out by leaders are still unable to increase community understanding related to community empowerment and ADD management, The ability of Kaur Finance in the use of technology is still lacking, and the priority of financial use is still for physical development.

Keywords: Management, village fund allocation, community empowerment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Nagari Matua Hilia, Kabupaten Agam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik purposive yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Sumber daya yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dari informan penelitian dan data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, karya ilmiah dan foto yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Data diperoleh dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memastikan validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi metode dan sumber. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Matua Hilia telah melibatkan masyarakat

dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD), namun perencanaan penggunaan ADD lebih terfokus pada kegiatan pemerintah Nagari, dan belum memadai dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan penggunaan dana ADD. Sedangkan faktor penghambat Penggerakan yang dilakukan pemimpin masih belum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan ADD, kemampuan dari Kaur Keuangan dalam penggunaan teknologi yang masih kurang, serta manajemen penggunaan keuangan alokasi dana desa untuk pembangunan fisik dan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: pengelolaan, alokasi dana desa, pemberdayaan masyarakat

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mengatur keberadaan desa melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa. UU tersebut juga mengatur organisasi pemerintah di desa. Harapannya, setiap desa dapat melaksanakan pembangunan di wilayahnya sendiri. Salah satu aspek kunci dalam pemerintahan desa adalah alokasi dana desa, yang harus mencapai paling tidak 10% dari anggaran. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung otonomi daerah dalam menyediakan layanan, melakukan pembangunan, dan memberdayakan masyarakat di tingkat desa. Pengelolaan yang baik dan transparan dari alokasi dana desa sangat penting, karena hasilnya akan tampak dalam kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan otonomi desa (Faizatul Karimah, 2014)

ADD merupakan sejumlah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan khusus bagi desa dan dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tingkat kabupaten atau kota. Dana ini difungsikan untuk mendukung pengelolaan pemerintahan desa, melaksanakan proyek-proyek pembangunan, program-program pembinaan masyarakat, dan usaha-usaha pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang disalurkan oleh pemerintah lebih ditujukan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ketersediaan ADD merupakan salah satu bentuk dukungan atau insentif finansial untuk meningkatkan progres pembangunan pemerintah desa, dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui swadaya dan gotong royong dalam kegiatan pemerintahan dan upaya pemberdayaan (Rorong dkk, 2021).

Penggunaan ADD juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan mengutamakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang sangat diperlukan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan mayoritas penduduk desa. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, proyek-proyek yang didanai oleh dana desa harus dipilih dengan memastikan bahwa mereka memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 1 ayat 12 dinyatakan bahwa Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk meningkatkan otonomi dan kesejahteraan dengan cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya melalui pembentukan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan permasalahan inti dan kebutuhan utama masyarakat desa.

Tujuan dari alokasi dana desa juga meliputi beberapa hal, seperti termasuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa serta memberdayakan masyarakat, memperkuat praktik nilai-nilai agama dan budaya untuk meningkatkan kondisi sosial, mendukung ketertiban dan keamanan masyarakat, meningkatkan pelayanan kepada penduduk desa untuk mendukung perkembangan aktivitas sosial dan ekonomi mereka, dan meningkatkan pendapatan desa dan penduduk desa melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMNag). Berikut ini tabel program pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa di Nagri Matua Hilia.

Tabel 1 Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui ADD di Nagari Matua Hilia,

Kabupaten Agam Tahun 2021-2023

No	Program	Penerima Manfaat	Biaya	Sumber Dana	Tahun
1	Pembangunan Irigasi Banda Kumpang	Masyarakat	Rp. 57.000.000,00	ADD	2021
2	Pemberian Bantuan Pertanian Kepada Masyarakat (pupuk, plastik, bibit)	Masyarakat	Rp. 64.000.000,00	ADD	2022
3	Pembangunan Jalan Usaha Tani di Jorong Banda Gadang	Masyarakat	Rp. 96.000.000,00	ADD	2022
4	Pengembangan Kapasitas Pengurus BUMNAG (badan usaha milik nagari)	Masyarakat	Rp. 104.000.000,00	ADD	2023

Sumber: Matua Hilia Tahun 2021-2023

Setelah melakukan pengamatan serta melakukan wawancara dengan Bapak Yusril Caniago, seorang petani di Nagari Matua Hilia, hasilnya adalah sebagai berikut:

“Masih terdapat kepincangan Pemerintah Nagari Matua Hilia dalam menentukan prioritas pembangunan, perencanaan, dan pelaksanaannya terutama dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu, minimnya upaya pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan UMKM, kegiatan peningkat SDM masyarakat Matua Hilia.”

Dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa masih terdapat kendala dan juga kepincangan Pemerintah Nagari Matua Hilia dalam menentukan prioritas pembangunan, perencanaan, dan pelaksanaannya terutama dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu, minimnya upaya pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan UMKM, kegiatan peningkat SDM masyarakat Matua Hilia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian Nagari Matua Hilia Kabupaten Agam yang mana merupakan bagian dari organisasi pemerintahan yang berperan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Informan yang dijadikan dalam penelitian yaitu : (1) Wali Nagari Matua Hilia, (2) Seksi Kesejahteraan, (3) Seksi Urusan Perencanaan, (4) Seksi Urusan Keuangan, (5) Kelompok Pemberdayaan Masyarakat, (6) Tokoh Masyarakat. Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif. Analisis deskriptif ini digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena yang terjadi dilapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi dengan menggunakan metode dan sumber data yang berbeda. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis manajemen ADD perlu dilaksanakan untuk memahami bagaimana dana tersebut dikelola di Nagari Matua Hilia dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat. Pendekatan pemberdayaan ini lebih menekankan pengelolaan ADD yang berfokus pada pengembangan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Nagari Matua Hilia, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Jika pengelolaan ADD difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat, hal ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Nagari Matua Hilia, Kabupaten Agam, adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Menurut pandangan teori dari Henry Fayol dan GR Terry, perencanaan adalah proses di mana suatu organisasi menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Di Nagari Matua Hilia, perencanaan terkait dengan pengelolaan keuangan Nagari, yang mencakup ADD, dilaksanakan melalui pertemuan yang diadakan di tingkat Jorong.

Pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari di Nagari Matua Hilia melibatkan perangkat Nagari, perwakilan dari masing-masing Jorong, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Agenda yang diperbincangkan dalam rapat ini mencakup berbagai kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat Nagari Matua Hilia. Salah satu contohnya adalah permintaan bantuan untuk para petani di Nagari Matua Hilia, seperti kebutuhan pupuk dan traktor untuk mendukung pekerjaan pertanian masyarakat, karena mayoritas penduduk di Nagari Matua Hilia bekerja sebagai petani. Selanjutnya, usulan mengenai masalah dan solusi ini diajukan oleh kepala Jorong (Walijorong) untuk dibahas dalam pertemuan Musyawarah Nagari sebagai tahap selanjutnya.

b. Pengorganisasian

Mengacu pada teori Henry Fayol dan GR Terry, Pengorganisasian adalah tindakan pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki oleh organisasi untuk melaksanakan rencana-rencana yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Nagari Matua Hilia, kegiatan pengorganisasian ini melibatkan partisipasi masyarakat, dan tidak ada pembatasan dari pemerintah Nagari Matua Hilia untuk masyarakat yang ingin terlibat dalam pelaksanaan ADD.

Proses pengorganisasian ini dengan membutuhkan bentuk komunikasi efektif antara pengurus dan anggota organisasi, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya miskomunikasi yang dapat menghambat pengelolaan ADD dan membuat tentang laporan hasil pertanggungjawaban penggunaan ADD kurang jelas kepada masyarakat. Komunikasi yang efektif menjadi sangat penting dalam organisasi. Hal ini membantu dalam menghindari kesalahan yang mungkin terjadi, sehingga proses pelaporan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat Nagari Matua Hilia.

c. Pengarahan

Mengacu pada konsep dari teori Henry Fayol dan GR Terry, Pengarahan merupakan usaha yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan sehat guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Di Nagari Matua Hilia, pihak berwenang telah memberikan arahan yang memadai dalam melaksanakan pengelolaan ADD. Proses

pembimbingan untuk masyarakat telah dirancang dengan baik. Oleh karena itu, sekretaris Nagari Matua Hilia telah memberikan arahan dalam pelaksanaan ADD melalui tingkat jorong dan berbagai forum yang diikuti oleh masyarakat.

Meskipun upaya pengarahan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Matua Hilia telah cukup baik, namun masih ada sebagian masyarakat yang kurang memahami tentang pengelolaan keuangan Nagari, terutama terkait dengan ADD.

Masyarakat hanya mengetahui informasi tentang pelaksanaan proyek dan mereka berpartisipasi dengan memberikan kontribusi berupa tenaga ketika diperlukan, tanpa memiliki pemahaman yang memadai tentang sumber pendanaan yang digunakan. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengarahan yang maksimal dari pemerintah Nagari, tetapi juga oleh tingkat wawasan yang terbatas dari masyarakat, sehingga pemahaman mengenai keuangan Nagari juga terbatas.

Pada tahap pengarahan ADD, Wali Nagari Matua Hilia dibantu oleh sekretaris Nagari Matua Hilia belum secara jelas mengarahkan penggunaan ADD untuk program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan di Nagari Matua Hilia masih memanfaatkan Dana Desa, bukan ADD.

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan langkah yang diambil untuk mengevaluasi kinerja dengan merujuk pada standar yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi kebutuhan perbaikan jika diperlukan. Dalam situasi pengawasan pelaksanaan ADD di Nagari Matua Hilia, struktur tersebut telah memberikan peluang bagi warga untuk menyampaikan masukan atau keluhan berkaitan dengan bantuan yang diberikan kepada kelompok petani dan penduduk yang kurang mampu. Selain itu, pengawasan untuk ADD juga melibatkan berbagai pihak seperti Bappeda, Inspektorat BPK, Pemerintah Kecamatan, dan Setda yang melakukan pemantauan dan evaluasi langsung di lapangan. Dinas terkait melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, dengan fokus pada verifikasi bukti fisik di lapangan serta tinjauan laporan yang disampaikan.

Dilihat dari perspektif pelaporan penggunaan ADD, dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam proses tersebut. Mayoritas masyarakat masih kurang familiar dengan pelaporan ADD dan aspek keuangan Nagari lainnya. Pelaporan ADD saat ini melibatkan tokoh masyarakat yang dianggap memiliki kredibilitas dalam rapat-rapat yang membahas laporan pertanggungjawaban ADD. Untuk faktor yang mempengaruhi penggunaan pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Nagari Matua Hilia Kabupaten Agam yaitu:

a. Kepemimpinan

Kepemimpinan yang dilakukan Walinagari Matua Hilia yang dibantu oleh Sekretaris Nagari selaku koordinator berupaya untuk terus memberdayakan masyarakat dengan mengajak dan mengarahkan masyarakatnya untuk terus ikut dalam tahap-tahapan pengelolaan keuangan ADD, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Namun upaya yang dilakukan dari pemerintah Nagari Matua Hilia masih dalam tahap peningkatan dimana masih banyak masyarakat belum paham tentang sistem-sistem pengelolaan keuangan Nagari yang didalamnya terdapat ADD, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang mengatakan Walinagari yang kurang profesional dalam memimpin Nagari Matua Hilia dan kurang tegas dalam memimpin perangkat nagari.

b. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Keuangan

Pengelola keuangan Nagari Matua Hilia dipegang oleh Kepala Urusan Keuangan. Fakta yang terjadi dilapangan ternyata Kaur Keuangan Nagari kesulitan menggunakan teknologi, kesulitan saat ditanya oleh masyarakat mengenai keuangan Nagari. dengan keterbatasan tersebut dalam pengelolaan keuangan Nagari Biasanya menggunakan bantuan dari pihak lain maupun perangkat Nagari, yang seharusnya Kaur Keuangan Nagari sudah mahir dalam menggunakan teknologi, apalagi dalam pengelolaan keuangan menggunakan sistem siskuedes

Keterbatasan dari Kaur Keuangan Nagari ini cenderung menghambat pengelolaan keuangan Nagari yang didalamnya terdapat ADD sehingga mendorong pengelolaan keuangan menjadi kurang efektif. Dalam hal ini dapat dilihat dari kualitas perangkat Nagari masih belum memadai. Untuk itu pemerintah Nagari Matua Hilia terus berupaya meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan, sehingga pengelola keuangan tidak terhambat dikarenakan kualitas SDM yang rendah, agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, kualitas SDM pengelola yang baik juga bisa meningkatkan kepercayaan dari masyarakat untuk bisa mengelola keuangan Nagari dengan baik.

c. Faktor Manajemen Pengelola ADD

Manajemen pengelolaan adalah sistem manajemen yang dipakai didalam pengelola keuangan Desa juga terdapat Alokasi Dana Nagari. Manajemen pengelola keuangan Nagari Matua Hilia memanfaatkan sebuah Sistem Keuangan Desa (Siskuedes). Siskuedes adalah aplikasi yang difungsikan guna mempermudah Nagari di dalam mengelola keuangannya, menggunakan teknologi untuk mempermudah pekerjaan manusia memang suatu hal yang positif. Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) yang telah digunakan di Nagari Matua Hilia secara keseluruhan telah memberikan manfaat yang baik.

d. Faktor Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat Nagari Matua Hilia dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sudah cukup baik, karena masyarakat ikut serta dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Matua Hilia, seperti mengikuti musyawarah nagari sehingga program yang akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Matua Hilia telah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD), namun perencanaan penggunaan ADD lebih terfokus pada kegiatan pemerintah Nagari, dan belum memadai dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan penggunaan dana ADD. Sedangkan faktor penghambat dalam penggunaan alokasi dana desa yaitu pemimpin masih belum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan ADD, kemampuan dari Kaur Keuangan dalam penggunaan teknologi yang masih kurang, manajemen pengelolaan penggunaan keuangan dana desa untuk pembangunan fisik dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Labaso. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tongko Kecamatan Lage Kabupaten Poso. *Jurnal EKOMEN* Vol. 18 No. 1 – Januari 2018
- Annisa, N. (2021). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa bontokaddopepe kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/21806-Full_Text.pdf
- Arif Hidayatullah. Dkk. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. *Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik* Volume 3, Nomor 2, April 2022
- Endang Siti Rukmana Lapi, dkk. (2019). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu). *Jurnal Respon Publik* Volume 13, No. 3, Tahun 2019, Hal 47-52 ISSN 2302-8432
- Faizatul Karimah, dkk. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602

Meutia Liliana. Intan. (2017). Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* vol.7. Hal 227-429.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber pada APBN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Suharto, Edi. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Vicktor Makatangi, dkk. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Sosolat Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Holistik* Vol. 13 No. 1 / Januari – Maret 2020

Yamulia Hulu dkk. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Medan. 2018, *Jurnal Pendidikan Ilmu- Ilmu Sosial Unimed*.